

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu industri strategis terbesar di tingkat global adalah pariwisata yang harus dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional dan menjadi sektor unggulan dalam memperoleh devisa. Pembangunan kepariwisataan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki perekonomian bagi masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh (Ian T. Chirstie and D. Elizabeth Crompton, 2003:63) yaitu:

“Tourism can be a potent development tool, generating economic growth, diversifying the economy, contributing to poverty alleviation and also creating backward and forward link ages to other production and service sectors”. (Pariwisata memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi, meningkatkan diversifikasi, mengurangi kemiskinan, dan membangun hubungan dengan industri produk dan penyedia jasa lainnya).

Unsur-unsur pariwisata menurut Kurniawan (dalam Motos et al., 2021) adalah atraksi, transportasi, akomodasi, fasilitas, dan infrastruktur yang merupakan bagian dari aktivitas pariwisata. Dengan diterapkannya unsur-unsur tersebut pada suatu industri pariwisata, maka dapat dikatakan industri pariwisata tersebut telah memenuhi standar pariwisata yang baik. Pariwisata yang direncanakan dengan baik akan berdampak besar pada masyarakat dan lingkungan di sekitar sektor tersebut.

Pengembangan pariwisata secara aktif juga dilakukan di daerah-daerah termasuk Kabupaten Kebumen. Dengan mengutamakan konservasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah Kabupaten Kebumen menyadari

peran sektor pariwisata sebagai alat untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 1 ayat 3 tentang keterlibatan semua pihak dalam pembangunan sektor pariwisata menyatakan bahwa kegiatan pariwisata didukung dengan pengelolaan oleh masyarakat, pemerintah, dan industri pariwisata, pembangunan sektor pariwisata daerah memerlukan kerja sama yang jelas dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah maupun sektor pariwisata.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, sebagai salah satu daerah dengan kawasan wisata unggul di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Kebumen bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pariwisata serta membangun atau mengelola kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Keseriusan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan perekonomian daerah tengah diupayakan melalui pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen menjadi kawasan bertaraf internasional pada *UNESCO Global Geopark* (UGGp), setelah sebelumnya telah mendapatkan sertifikat sebagai *Geopark* Nasional pada November 2018. *UNESCO Global Geopark* (UGGp) adalah kawasan geografis tunggal dan terpadu di mana terdapat situs dan lanskap geologis yang memiliki nilai internasional dan dikelola sesuai dengan konsep perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2004 UNESCO meluncurkan konsep *Geopark* dengan tujuan melindungi kawasan konservasi berskala nasional yang memiliki kekayaan warisan geologi dan nilai estetika yang dikembangkan melalui model pengelolaan yang holistik.

Kawasan *Geopark* Kebumen berfokus pada konservasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2011-2025 menentukan kebijakan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata di Indonesia, termasuk pengembangan *Geopark* Kebumen.

Pengembangan *Geopark* Kebumen sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) menjadi tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi (*Geopark*) Kebumen Menuju *UNESCO Global Geopark* dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, pemangku kepentingan, dan masyarakat setempat tentang bagaimana mengembangkan dan mengelola *geopark* menuju *UNESCO Global Geopark* dengan cara yang terarah, sinergis, edukatif, dan mendorong ekonomi lokal.

Geopark Kebumen menjadi salah satu destinasi wisata yang mencakup *natural tourism*, *geotourism*, dan *cultural tourism* yang dikoordinasi langsung oleh Badan Pengelolaan *Geopark* Kabupaten Kebumen, yang juga melibatkan *stakeholders* dengan Bupati Kebumen selaku penanggung jawab. Kawasan ini memungkinkan konservasi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat karena kekayaan geologi, budaya, dan biologinya.

Geopark Kebumen menjunjung tinggi nilai-nilai *geodiversity*, *biodiversity*, dan *culturediversity* berdasarkan penjelasan terkait unsur utama *Geopark* menurut UNESCO. Selain menyajikan keindahan bentang alam *Geopark* juga menyajikan kekayaan budaya lokal dan keanekaragaman hayati. Ini yang menarik wisatawan untuk mengunjungi *Geopark* Kebumen. Dampak positif pengembangan sektor pariwisata yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik dari sektor pariwisata itu sendiri atau dari banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung (Siam, 2015).

Geopark adalah ide terbaik untuk pengembangan wilayah secara berkelanjutan. Warisan geologi Kabupaten Kebumen harus dilestarikan. Kawasan *Geopark* Kebumen memiliki 42 *Geosite*, 9 *Tanjible Cultural site*, 15 *Intanjible Cultural site*, dan 8 *Biosite* yang perlu terus dikembangkan untuk melindungi warisan dunia. Dalam proses pembangunan *Geopark*, kolaborasi antara entitas publik dan swasta menjadi tantangan. Pengembangan *geopark* yang berkelanjutan bergantung pada dukungan dan komitmen semua pihak terkait (Fauzi & Misni, 2016).

Pengembangan *Geopark* Kebumen membutuhkan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, bisnis, swasta, masyarakat, dan media. Metode *Penta helix ABCGM* menjadi solusi untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan *Geopark* Kebumen. *Pentahelix ABCGM* yaitu *Academics*, *Business*, *Community*, *Governemnt*, *Media* dan *Tourism*. Peran *Academics* (A) yaitu oleh BRIN Karangasambung dengan pelayanan terpadu dalam pengembangan *edu-tourism*. Peran *Business* (B) yaitu bisnis lokal di *Geopark* Kebumen yang membuat produk geo untuk dijual kepada wisatawan yang datang ke *Geopark* Kebumen. Peran *Community* (C) yaitu oleh Kebumen *Geopark Youth Forum*, yang berisikan anak muda Kabupaten Kebumen untuk ikut serta membantu dalam mengelola mengoptimalkan potensi *Geopark* Kebumen. Peran *Gevornment* (G) yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang memiliki peran besar dalam prosesi *Geopark* Kebumen menjadi *Aspiring UNESCO Global Geopark* (AUGGp) sampai dengan *Geopark* Kebumen mendapatkan predikat *UNESCO Global Geopark* (UGGp). Kemudian peran *Media* (M) yaitu sebagai promotor untuk menyebarluaskan informasi terkait *Geopark* Kebumen sehingga lebih banyak pengunjung yang tertarik untuk melihat *Geopark* Kebumen.

Untuk mencapai tujuan bersama maka diperlukan *collaborative governance* yang akan menghasilkan tujuan, agenda, strategi, sumber daya, dan aktivitas yang disepakati bersama untuk dilakukan. Menurut Balogh (dalam Subarsono, 2011) *collaborative governance* adalah proses dan struktur dalam manajemen perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari pemerintahan, institusi publik, institusi swasta, dan masyarakat sipil. Mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak jika mereka melakukannya sendiri. Kolaborasi memiliki makna yang berbeda dengan kerjasama serta koordinasi. Kolaborasi adalah proses secara menyeluruh, tidak terdapat negosiasi atau *bargaining* dalam kepentingan individu organisasi. Kolaborasi bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan menghasilkan keuntungan timbal balik untuk para pemangku kepentingan

atau *stakeholder* terkait, yang ikut serta dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut (Nazzarudin et al., 2003).

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan *Geopark* Kebumen tidak terlepas dari adanya berbagai tantangan dan hambatan. Kendala dalam upaya pengembangan *Geopark* mengakibatkan proses akselerasi berjalan lambat. Hal tersebut mendorong para pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dan hambatan dari pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan *Geopark* Kebumen dengan sistematis, akurat, efektif, dan efisien. Pembangunan dan pengembangan *Geopark* Kebumen membutuhkan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terorganisir dan terencana. Ini dilakukan agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan demikian penulis akan merumuskan masalah berikut: Bagaimana tantangan dan hambatan *collaborative governance* dalam pengembangan *Geopark* Kebumen, yang dianalisis melalui delapan indikator Agranoff dan McGuire (2003) (kepemimpinan efektif, kepercayaan antar organisasi, komunikasi efektif, ketergantungan dan koordinasi tugas, perbedaan tujuan dan prioritas, keterbatasan sumber daya, regulasi dan birokrasi, serta kultur organisasi), memengaruhi efektivitas pengelolaan dan pengembangan *geopark*, serta bagaimana strategi mitigasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang tantangan dan hambatan yang muncul selama implementasi *Collaborative Governance* dalam pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat membantu pemangku kepentingan dan *stakeholder* terkait dalam meningkatkan pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil identifikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai tantangan dan hambatan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan membedakan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian terdahulu maka memperbanyak referensi pustaka yang dapat digunakan oleh penulis dalam proses penelitian. Fokus yang ditekankan pada penelitian terdahulu meliputi konsep yang digunakan, metodologi dan pendekatan penelitian, hasil, dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, yaitu penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance untuk Pengembangan Sustainable Green Tourism sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Discourse Network Analysis Pada Geopark.kebumenkab.go.id)*” yang ditulis oleh Salma Arum Hidayah dan Rutiana Dwi Wahyunengseh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Kebumen. Sebaliknya, karena keberadaan *Geopark* Kebumen (GKK), Kabupaten Kebumen memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Ada kemungkinan bahwa *geopark* dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Pengawasannya dilakukan sesuai dengan gagasan *sustainable green tourism* dengan *collaborative governance*. Dengan menggunakan *discourse network analysis* (DNA), penelitian ini menganalisis teks berita yang diposting di geopark.kebumenkab.go.id pada tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian termasuk representasi kerja sama

pemerintahan untuk pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan sebagai upaya pengentasan kemiskinan; analisis hambatan dan peluang pengembangan *Geopark* Kebumen (GKK); dan pemetaan aktor yang terlibat dalam pengembangan *Geopark* (Arum Hidayah & Dwi Wahyunengseh, 2021).

Kedua, yaitu penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis*” yang ditulis oleh Adi Putra, Hasim As’ari, dan Adianto. Dalam pengembangan objek wisata seperti wisata bahari, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata alam di Rupat Utara, penelitian ini berfokus pada strategi kerja sama pengelolaan pariwisata. Masalah seperti abrasi, sampah, dan aksesibilitas muncul saat melakukannya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap desa di Kecamatan Rupat Utara memiliki prospek pariwisata. Untuk menerapkan *collaborative governance tourism*, diperlukan *Principled Engagement*, *Shared Motivation*, dan *Capacity for join Action*. Kendala dalam menerapkan manajemen kolaboratif pariwisata adalah keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersamaan (Putra dkk., 2022).

Ketiga, yaitu penelitian yang berjudul “*Collaborative Governance sebagai Langkah Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Ekowisata Bahari di Pulau Pisang)*” yang ditulis oleh Devi Meri Yanti. Penelitian ini membahas *collaborative governance* sebagai langkah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan desain kolaboratif baru untuk pengembangan pariwisata. Studi ini melakukan penelitian kualitatif deskriptif. Studi ini menemukan bahwa dalam proses pengembangan pariwisata, belum ada kolaborasi secara hukum antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain baru untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, yaitu *collaborative governance*, yang sudah memasukkan elemen-elemen yang diperlukan untuk keberhasilan kolaborasi. Jika ada delapan kriteria keberhasilan yang belum sepenuhnya diterapkan, pemerintah telah menggunakan tiga di antaranya dalam proses pengembangan pariwisata, yaitu *governance*, *access to authority*, dan *information sharing* (Yanti, 2022).

Keempat, yaitu penelitian yang berjudul “*Analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pentahelix di Desa Jambu Kabupaten Kediri*” yang ditulis oleh Resti Oktaviarni, Tri Yumarni, dan Niken Lastiti Veri Anggraeni. Penelitian ini membahas tentang siapa saja aktor *Pentahelix* yang terlibat dalam pengembangan Agro Petik Kelengkeng. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tidak terdapat peran dari aktor bisnis, sehingga menyebabkan pengembangan desa wisata tidak berjalan dengan optimal. Peneliti menyarankan agar program CSR dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jambu, dengan membentuk tim media publikasi dan melibatkan aktor Pemerintah untuk melakukan pelatihan publikasi di media sosial (Oktaviarni et al., 2023).

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Governance

Menurut UNDP *governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels*” yang berarti pelaksanaan, yakni pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola permasalahan nasional pada semua tingkatan (Manaf, 2016).

Governance menurut World Bank mengacu pada cara kekuasaan dan tanggung jawab yang terbagi di antara berbagai aktor dalam suatu masyarakat dan pada desain dan fungsi dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi proses tersebut. Tata kelola yang baik, yaitu tata kelola yang efektif, efisien, adil, merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (World Bank, 1992). Ada beberapa elemen kunci dalam konsep *governance* menurut World Bank:

1. Partisipasi berarti bahwa masyarakat sipil, termasuk warga negara biasa, memiliki kemampuan dan akses untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
2. Keterbukaan dan Transparansi yaitu, keputusan politik, kebijakan, memiliki aktivitas pemerintah secara umum harus transparan, mudah diakses oleh masyarakat dan akuntabel.

3. Ketertanggungjawaban (*Accountability*) yaitu, para pemimpin dan lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat dan hukum.
4. Ketepatan Hukum (*Rule Of Law*) yaitu, prinsip-prinsip hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten, serta menghormati hak asasi manusia.
5. Efektivitas dan Efisiensi Pemerintah yaitu, pemerintah harus beroperasi dengan efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip governance ini, diharapkan suatu negara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun sistem yang lebih adil bagi semua warganya.

Pemerintah memperhatikan pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, ini disebabkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya semakin kompleks dan menghadirkan banyak masalah dan kesulitan (Dwiyanto, 2018). Menurut Chemma dalam (Keban, 2014: 37) terdapat empat fase perkembangan paradigma dalam administrasi publik yaitu fase *Traditional Public Administration*, *Publik Management*, *New Public Management* dan paradigma *Governance*. Chemma menyatakan bahwa paradigma pemerintahan adalah suatu sistem atau nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta digunakan untuk mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik. Paradigma ini mendorong interaksi antara ketiga aktor, yaitu masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, untuk mendorong pembangunan yang berpusat pada rakyat. Paradigma ini mengutamakan cara-cara di mana masyarakat dan kelompok dapat menyampaikan kepentingannya, mengatasi perbedaan, dan menjalankan hak dan kewajibannya.

Governance bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam pengaturan, pihak lain dari sektor swasta, publik, dan masyarakat juga harus berpartisipasi. Bagian

atau aktor dari pemerintahan tersebut memiliki fungsi dan peran yang berbeda, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. *Public Sector* (Pemerintah)

sebagai organisasi dan ruang publik bagi masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membuat dan menerapkan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan bersama. Secara umum *public sector* (pemerintah) memiliki empat fungsi yakni fungsi pelayanan (*service*), fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi pemberdayaan (*empowerment*).

2. *Private Sector* (Swasta)

Sebagai ruang bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan serta tujuan mereka secara pribadi. Sektor swasta bergantung pada kekuatan ekonomi untuk mencari keuntungan yang dikendalikan oleh individu, kelompok, atau organisasi swasta. Karena memiliki orientasi untuk mencari keuntungan sehingga sektor swasta dipengaruhi oleh perhitungan ekonomi berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

3. *Community Sector* (Masyarakat)

Sebagai partisipan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Finner (dalam Setiyono, 2014) mendefinisikan *governance* sebagai:

“Governance by contrast, refers to the process of making collective decisions, a task in which government may not play a leading, or even, any role. In international relations, for example, no world government exist to resolve problems but many issues are resolved by negotiation”. (Kepemerintahan, mengacu pada proses pengambilan keputusan bersama, suatu tugas di mana pemerintah mungkin tidak memainkan peran utama “pemimpin”, atau bahkan, peran apa pun. Dalam hubungan internasional, misalnya tidak ada

pemerintahan dunia yang ada untuk menyelesaikan masalah tetapi banyak isu diselesaikan melalui negosiasi).

Sementara sektor swasta menyediakan lapangan kerja dan pendapatan, pemerintah diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menciptakan kondisi politik dan hukum yang kondusif, dan masyarakat diharapkan menjalankan interaksi sosial dan politik yang sehat.

1.6.2 Collaborative Governance

Menurut (Ansell & Gash, 2008) menyatakan bahwa pemerintahan kolaboratif adalah cara mengelola pemerintahan yang melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung. Pendekatan ini berfokus pada proses pengambilan keputusan bersama di mana satu atau lebih lembaga publik langsung melibatkan pemangku kepentingan "*non-state*" dalam proses resmi pembuatan kebijakan. Pendekatan ini berfokus pada proses perundingan dan diskusi yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan dan program publik.

“Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai *collaborative governance*, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar *stakeholders*. *Collaborative governance* dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor *governance*. Melalui perspektif *collaborative governance*, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai” (Irawan, 2017).

Konsep *collaborative governance* digunakan sebagai tanggapan atas kenyataan bahwa banyak permasalahan yang sangat kompleks dan dinamis sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, yaitu pemerintah, tetapi memerlukan kerja sama tim untuk menyelesaikannya. Ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk bisnis, pemerintah, lembaga masyarakat sipil,

akademisi, dan masyarakat umum (Astuti et al., 2020). Kolaborasi adalah cara sekelompok orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Pihak-pihak ini menerima manfaat dan efek dari kerja sama tersebut (Haryono, 2012).

Collaborative governance mengutamakan kerjasama dan kolaborasi antarpihak dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Selama proses kolaborasi, para pihak yang terlibat dapat saling memahami perspektif masing-masing sehingga solusi yang dihasilkan lebih luas dan berkelanjutan (Fanani & Ibrahim, 2018). Karena pengambilan keputusan dalam *collaborative governance* dilakukan secara terbuka dan transparan, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemangku kepentingan memiliki akses yang cukup ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat (Riskiyono, 2015).

Kebijakan dan masalah publik menjadi pusat kerja sama *collaborative governance*. Meskipun institusi publik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah untuk mencapai tingkat persetujuan di antara pemangku kepentingan. Tujuan *collaborative governance* adalah untuk mencapai keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Astuti et al., 2020).

Model *collaborative governance* menurut (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap awal hubungan antar *stakeholder*, di mana masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda, yang menghasilkan hubungan asimetris dalam relasi yang berlangsung.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Terdapat tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. Manajemen proses kolaborasi yang cukup;
- b. Manajemen kemampuan untuk menerapkan kredibilitas teknis;
- c. Menjamin bahwa kolaborasi saat ini memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan sehingga semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi merasa nyaman

3. *Institutional Design* (Desain Institusional)

Protokol dan aturan dasar untuk kerja sama sangat penting dalam desain institusional. Dalam proses kolaborasi, legitimasi procedural adalah hal yang paling ditekankan. Agar kolaborasi berjalan dengan baik, pemerintah harus terbuka dan inklusif.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Menurut Gray dalam Ansell dan Gash, ada tiga tahap proses kolaborasi: penentuan masalah (penentuan permasalahan), penentuan arah (penentuan tujuan), dan implementasi.

Menurut (Irawan, 2017), *collaborative governance* merupakan proses yang melibatkan kebiasaan dan interaksi saling menguntungkan antara aktor pemerintahan untuk mencapai tujuan yang menguntungkan bagi semua pihak. (Ratner, 2012) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses *collaborative governance*, yaitu:

1. *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Tahap dimana pemerintah dan pihak yang berkepentingan atau pihak yang berwenang mengidentifikasi tantangan apa pun yang terjadi selama proses tata kelola pemerintahan.

2. *Debating Strategies for Influence* (Fase Dialog)

Pada tahap ini para pemangku kepentingan dan *stakeholders* melakukan diskusi mengenai hambatan yang ada, yaitu mendiskusikan penyelesaian paling efektif untuk mengatasi hambatan yang ada.

3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Pada tahap ini para pemangku kepentingan dan *stakeholders* membuat rencana untuk menerapkan setiap strategi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa kerja sama berlangsung lama.

Konsep kolaborasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana berbagai pihak bekerja sama satu dengan yang lainnya. Menurut (Goldsmith & Kettl, 2009) terdapat delapan kriteria keberhasilan *collaborative governance*, yaitu:

1. *Networked Structure*

Hubungan antar elemen yang menggambarkan komponen fisik jaringan yang ditangani. Unsur-unsur jaringan ini tidak boleh menciptakan hierarki yang dimiliki oleh salah satu pihak. Ini berarti setiap orang memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, kekuasaan, dan kesempatan yang sama.

2. *Commitment to a Common Purpose*

Jaringan yang dibangun harus memiliki komitmen sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen yang terjalin tidak memihak kepada salah satu pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Komitmen yang terjalin harus berlandaskan kerja sama untuk mencari solusi atas persoalan publik dan untuk mencapai tujuan bersama organisasi.

3. *Trust Among The Participants*

Membangun kepercayaan terhadap setiap elemen yang terlibat sebagai wujud profesionalitas dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif.

4. *Governance*

Hubungan saling mempercayai diantara para aktor pemerintahan. Terdapat aturan yang disepakati bersama dari masing-masing pemangku kepentingan dan *stakeholders* serta adanya kebebasan untuk menentukan bagaimana kolaborasi akan dijalankan.

5. *Access to Authority*

Terdapat aturan yang mengatur masing-masing pemangku kepentingan dan *stakeholders* dalam melakukan kolaborasi agar dapat menjalankan peran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

6. *Distributive Accountability Responsibility*

Untuk mencapai tujuan bersama, semua pemangku kepentingan dan *stakeholder*, termasuk masyarakat harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas.

7. *Information Sharing*

Kemudahan akses informasi bagi oleh masing-masing pemangku kepentingan dan *stakeholder*, yaitu mencakup perlindungan privasi dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota. Oleh karena itu informasi harus dibagi dengan jelas.

8. *Access to Resources*

Berkaitan dengan ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kolaborasi.

1.6.3 *Pentahelix ABCGM* dalam Pengembangan Pariwisata

Model *Pentahelix ABCGM* terdiri dari lima *stakeholders* diantaranya *Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, dan *Media*. Model kerjasama *Pentahelix ABCGM* bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dari sektor Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media sebagai pendorong dalam pengembangan *Geopark* Kebumen, dan juga berguna sebagai pendekatan untuk mencari solusi terkait tantangan dan hambatan *collaborative governance* dalam pengembangan *Geopark* Kebumen.

Model *pentahelix* ini merupakan perluasan dari konsep *Triplehelix* yang awalnya hanya melibatkan Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah sebagai aktor utama dalam inovasi ekonomi berbasis pengetahuan (Lindmark et al., 2009). Konsep tersebut kemudian berkembang dengan menambahkan peran Komunitas dan Media untuk memperkaya proses inovasi dan pembangunan, sehingga lahirlah model *Quadruplehelix* dan *Pentahelix ABCGM* (Yawson, 2009).

Setiap elemen dalam *Pentahelix ABCGM* memiliki peran penting, yang diharapkan mampu mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh banyaknya sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis. Berikut peran masing-masing aktor dalam model *Pentahelix ABCGM* menurut (Dani Rahu, 2021), antara lain:

1. Akademisi (*Academic*)

Akademisi berperan sebagai sebagai sumber pengetahuan untuk pengembangan destinasi wisata; ini mencakup konsep, teori, dan model pengembangan terbaru yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata.

2. Industri Swasta (*Business*)

Industri swasta atau bisnis berperan sebagai *enabler*, industri swasta menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan (*sustainability*). *Enabler* yaitu berperan dalam menyediakan infrastruktur teknologi, modal, dan berbagai fungsi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan produk dan pemasaran barang dan jasa yang dibuat oleh masyarakat di sekitar destinasi wisata yang sedang dikembangkan.

3. Komunitas (*Community*)

Komunitas berperan sebagai *akselator*, yaitu sebagai penghubung antar *stakeholder* untuk membantu masyarakat dalam proses keseluruhan dan mempercepat adopsi ekonomi. Sebuah destinasi wisata dapat dipromosikan oleh komunitasnya juga.

4. Pemerintah (*Government*)

Selama pertumbuhan pariwisata, pemerintah bertindak sebagai regulator dan kontroler. Pemerintah melakukan hal-hal seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, dan alokasi keuangan, perizinan, pengembangan dan pengetahuan, serta mendukung jaringan inovasi dan kolaborasi. Selain itu, pemerintah juga membantu berbagai pihak yang berkontribusi pada pertumbuhan pariwisata.

5. Media (*Media*)

Media berfungsi sebagai *expander* dalam mendukung publikasi tersebut dalam promosi produk dan layanan pada destinasi wisata. Media juga memainkan peran dalam membangun *brand image* dalam pengembangan pariwisata. Dengan adanya media maka lebih mudah dalam mengakses informasi pariwisata tersebut. Kemudahan inilah yang

menjadi salah satu faktor yang mendukung kedatangan kolaborator yang dapat membuat pengembangan pariwisata.

Implementasi teori *Pentahelix ABCGM* banyak ditemukan dalam berbagai proyek pembangunan, terutama dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Model *Pentahelix ABCGM* dapat membantu dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sektor publik dan swasta.

1.6.4 Tantangan dan Hambatan Kolaborasi

Kolaborasi disebut sebagai alternatif untuk meningkatkan keterlibatan kelompok dan kepemimpinan dalam sebuah organisasi yang tidak berhasil. Kompleksitas yang muncul selama perkembangan kolaborasi menyebabkan kondisi yang saling memperkuat para pihak terkait, yang menghasilkan peningkatan permintaan untuk kerja sama dan ketergantungan antar lembaga (Subarsono, 2016).

Dalam (Warsono, 2015) disebutkan bahwa tantangan utama dalam kolaborasi dikenal dengan VUCA (*volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity*), berikut penjelasan dari VUCA yaitu:

1. *Volatile*

Perubahan yang tidak stabil secara cepat dan tidak dapat diprediksi, tetapi memberikan dampak yang signifikan dan tidak terduga. Semakin tidak stabilnya dunia, semakin cepat perubahan itu terjadi (Saleh & Watson, 2017).

2. *Uncertainty*

Ketidakpastian dalam birokrasi publik akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan, yang merupakan proses di mana birokrasi publik membuat kebijakan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dari masa lalu untuk digunakan dalam membuat kebijakan yang akan datang. Metode yang disebut *forecasting extrapolative* tidak relevan dengan masalah yang terjadi saat ini, yang semakin kompleks.

3. *Complexity*

Proses pengambilan keputusan semakin sulit karena kompleksitas tatanan masyarakat global yang kompleks dengan banyak aktor dan faktor yang saling berhubungan. Problem yang lebih kompleks menjadi lebih sulit untuk dianalisis.

4. *Ambiguity*

Ketidaklengkapan informasi merupakan masalah yang signifikan bagi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ketidaklengkapan informasi dapat menyebabkan ambiguitas dalam proses pengambilan keputusan birokrasi publik, yang dapat merugikan banyak pihak (Abidi & Joshi, 2018).

Tantangan dan hambatan kolaborasi menurut (Agranoff & McGuire, 2003) terbagi menjadi delapan, yaitu:

1. Kepemimpinan yang Efektif

Memimpin kolaborasi antar organisasi pemerintahan memerlukan keterampilan yang berbeda, kepemimpinan kolaborasi memiliki tantangan agar dapat menginspirasi dan mengarahkan kelompok yang beragam serta mengelola dinamika kekuasaan dan pengaruh antar organisasi.

2. Kepercayaan antar Organisasi

Kepercayaan merupakan fondasi penting bagi keberjalanan kolaborasi. Namun membangun dan memelihara kepercayaan di antara berbagai entitas pemerintah sering kali sulit.

3. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang buruk dapat menghambat kolaborasi. Hal ini terkait dengan masalah dalam pertukaran informasi, kesalahpahaman karena perbedaan terminologi atau budaya organisasi, dan kurangnya saluran komunikasi yang jelas dan terbuka.

4. Ketergantungan dan Koordinasi Tugas

Ketergantungan antar tugas memerlukan koordinasi yang tinggi, karena kurangnya koordinasi disaat suatu organisasi memiliki tugas-tugas yang

saling bergantung akan menyebabkan ketidakefisienan, penundaan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan bersama.

5. Perbedaan Tujuan dan Prioritas

Setiap organisasi yang terlibat dalam kolaborasi sering kali memiliki tujuan dan prioritas yang berbeda. Menyelaraskan tujuan masing-masing organisasi merupakan tantangan utama dalam kolaborasi, terutama ketika organisasi memiliki visi, misi, dan target yang berbeda.

6. Keterbatasan Sumber Daya

Kolaborasi sering terhambat karena terbatasnya sumber daya yang ada. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya anggaran, staf, waktu, dan teknologi.

7. Regulasi dan Birokrasi

Struktur birokrasi yang kaku dan peraturan yang kompleks dapat menghambat fleksibilitas yang diperlukan untuk kolaborasi. Perbedaan dalam aturan dan regulasi antar organisasi dapat menghalangi pelaksanaan kolaborasi.

8. Kultur Organisasi

Setiap organisasi memiliki cara kerja, nilai, dan norma yang berbeda, yang dapat menyebabkan munculnya konflik dan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kolaborasi.

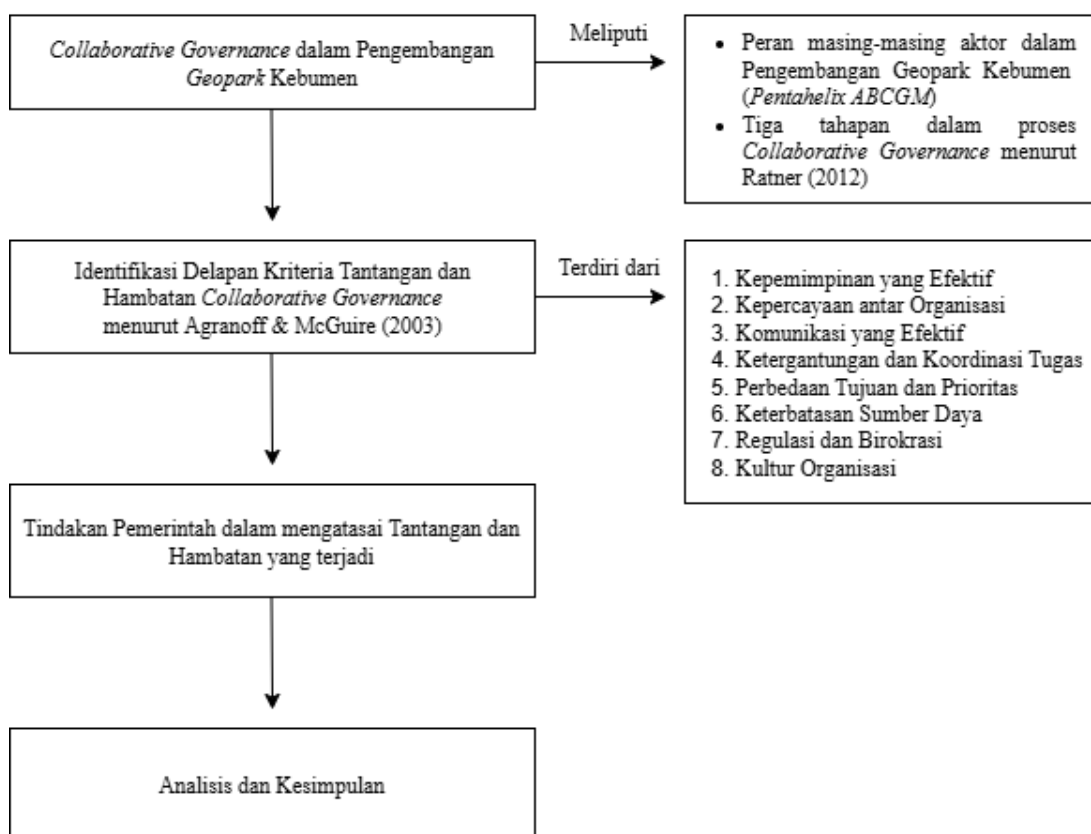
1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Kerangka Berpikir

Collaborative governance merupakan bentuk upaya kerjasama dan kolaborasi yang melibatkan aktor-aktor dalam negara seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kerangka pemikiran ini didasarkan pada teori-teori para ahli yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini sebagai pedoman untuk mengukur kesesuaian dalam teori yang digunakan dengan keadaan di lapangan sebenarnya, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif. Kerangka pemikiran ini berguna

dalam membantu peneliti untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen dengan menggunakan delapan indicator yang dikemukakan oleh Agranoff & McGuire (2003). Penelitian ini menggunakan teori tersebut karena peneliti menganggap teori ini sudah tepat dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan mengenai identifikasi tantangan dan hambatan selama proses *collaborative governance* pada pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



1.7.2 Kerangka Konseptual

Peneliti akan mengidentifikasi pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen sehingga dapat mengetahui tantangan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan *collaborative governance* tersebut. Dengan menggunakan model *Pentahelix ABCGM* dapat memberikan gambaran

tentang kolaborasi lima *stakeholders* dan diketahui optimasi peran dari unsur Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media sebagai pendorong kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ratner (2012), yang menguraikan tiga tahapan dalam proses *collaborative governance* yaitu, *Identifying Obstacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan), *Debating Strategies for Influence* (Fase Dialog), dan *Planning Collaborative Action* (Fase Pilihan). Teori dari ahli tersebut berguna sebagai pedoman dalam melaksanakan *collaborative governance* dalam pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen, sehingga dapat diketahui tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan *collaborative governance* sesuai dengan klasifikasi yang dijelaskan oleh Agranoff & McGuire. Tantangan dan hambatan kolaborasi dibagi menjadi delapan pengklasifikasian menurut Agranoff & McGuire (2003), yaitu Kepemimpinan yang Efektif, Kepercayaan antar Organisasi, Komunikasi yang Efektif, Ketergantungan dan Koordinasi Tugas, Perbedaan Tujuan dan Prioritas, Keterbatasan Sumber Daya, Regulasi dan Birokrasi, dan Kultur Organisasi.

Untuk menghindari konflik yang berujung pada ketidaksepakatan, diperlukan kerangka konseptual *collaborative governance* untuk memastikan bahwa proses interaksi berjalan efektif antara berbagai pihak terlibat dalam pembuatan produk atau kebijakan yang baik.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian secara kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian secara kualitatif menurut (Sugiyono, 2017) yaitu berarti penelitian yang bersifat naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah. Melalui penelitian secara kualitatif peneliti dapat mengenal subjek penelitian dengan baik, dan dapat mengetahui apa yang dirasakan subjek pada kehidupan kesehariannya (Basrowi & Suwandi, 2008). Sedangkan metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2017), yaitu:

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel datu dengan variabel lain”.

Penelitian deskriptif kualitatif mengkaji fenomena sosial yang nantinya akan memberikan gambaran melalui uraian secara analitis, sistematis, menyeluruh, dan dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau fenomena yang sedang diteliti.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan fokus pada Geopark Kebumen.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang memahami dengan baik apa yang sedang diteliti. Menurut Moloeng dalam (Basrowi & Suwandi, 2008) subjek penelitian memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain Pemerintah Kabupaten Kebumen, Swasta, dan Masyarakat Kabupaten Kebumen terutama mereka yang bertempat tinggal di sekitar kawasan *Geopark* Kebumen.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan *depth interview* kepada delapan informan, yaitu Bidang PSDAI Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, Bidang Infrastruktur Badan Pengelola *Geopark* Kebumen, Pengelola Kawasan Geodiversitas BRIN

Karangsambung, Ketua Pengelola Objek Wisata Pantai Kembar Terpadu, dan Karyawan sekaligus anggota BUMDESMA Objek Wisata Karangbolong.

Wawancara mendalam dengan delapan informan dalam penelitian ini penting karena masing-masing informan memiliki peran yang relevan dan signifikan dalam konteks penelitian, yaitu pengembangan kawasan *Geopark* Kebumen. Informan tersebut mencakup perwakilan dari berbagai bidang dan sektor, seperti pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan komunitas lokal yang memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang tantangan dan hambatan dalam kolaborasi.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Data primer dan sekunder adalah sumber dan jenis data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif (Kumar, 2010). Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan melalui pendekatan pertama, seperti wawancara dengan pihak yang relevan. Data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan melalui sumber kedua, seperti buku, jurnal, notulensi rapat, berita di media cetak atau non cetak yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi; uraian, penjelasan, dan tindakan digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan ini dikenal sebagai observasi. Dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, observasi memiliki karakteristik khusus. Peneliti dapat mengamati secara langsung segala hal yang terjadi di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari kerja sama pemerintahan di *Geopark* Kebumen. Peneliti yang menafsirkan apa yang mereka lihat di dunia nyata dan di lingkungan alami (Sugiyono, 2018: 229).

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan model wawancara bebas terpimpin. Menurut (Yusuf, 2014: 372) wawancara adalah suatu kejadian atau

proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai secara langsung tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan model wawancara bebas terpimpin. Menurut (Arikunto, 2016: 199) wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas tetapi tetap mengikuti standar wawancara yang sudah ditetapkan. Pertanyaan yang diajukan akan berubah sepanjang wawancara untuk mendapatkan informasi tentang penelitian. Setiap informan memiliki wawasan mendalam tentang aspek-aspek spesifik dari pengelolaan atau pengembangan kawasan Geopark, seperti pendidikan, infrastruktur, dan promosi wisata.

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015) adalah metode untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar, serta laporan dan keterangan untuk mendukung penelitian. Data dikumpulkan dengan bantuan dokumentasi, dan kemudian dianalisis. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi (Geopark) Kebumen Menuju UNESCO Global Geopark dan Surat Keputusan Badan Pengelola Geopark Kebumen adalah sumber penelitian ini.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menekankan analisis data pada proses yang terjadi di lapangan saat pengumpulan data, yang membantu merumuskan dan menjelaskan masalah yang terkait dalam penelitian. Terdapat tahapan-tahapan dalam menganalisis data, menurut (Miles et al., 2014) yaitu analisis data selama di lapangan, di mana pada saat pengumpulan data, kegiatan itu berlangsung dalam periode tertentu dan terbagi menjadi tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan dan menguraikan secara rinci data yang diklarifikasi dan diolah.

Analisis yang dikenal sebagai reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dengan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data yang telah direduksi. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel,

bagan, dan hubungan antar kategori. Ini membuat data terorganisir dan tersusun sehingga lebih mudah dipahami. Apabila tidak ada bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya, verifikasi atau penarikan kesimpulan hanya bersifat sementara dan dapat berubah. Hasil penelitian kualitatif dapat menjawab masalah dari awal.